Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Panglipuran Kabupaten Bangli

Dewa Made Atmaja

Mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Ilmu Lingkungan UNS

Abstrak

Meningkatnya jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan manusia dalam berbagai aspek menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan keruangan (*Spacial problems*). Permasalahan keruangan diantaranya adalah; pemukiman yang kumuh, rawan bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran, terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, tuna karya, serta menularnya berbagai macam penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan adanya tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas ruang, sehingga kehidupan yang nyaman dan harmoni akan tercapai.

Konsep tata ruang, sejatinya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum ledakan penduduk terjadi seperti saat ini. Adanya ruang yang dikeramatkan, hutan yang dikeramatkan, lahan yang tidak boleh untuk mendirikan rumah, kawasan pemukiman yang berkelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, kawasan untuk pemujaan, kawasan untuk pertanian, merupakan bentuk tata ruang lokal yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, oleh masyarakat "modern" tata ruang yang telah dibangun oleh nenek moyang ini dianggap sebagai sebuah konsep yang "kosong, tidak berdasar" dan "tanpa makna", karena tidak mampu dijelaskan secara rasional dan ilmiah. Akibatnya, penggunaan ruang dilakukan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan kapasitas ruang dan daya dukung lingkungan. Dapat dipastikan, tata ruang menjadi rusak dan tanpa bentuk yang pasti.

Berdasarkan Analisis konseptual dan kondisi empirik di atas, tampaknya aktualisasi tata ruang lokal merupakan salah satu alternatif yang sangat esensial untuk ditampilkan dalam format ilmiah, sehingga kita bisa memahami lebih dalam konsep keruangan yang dibangun oleh nenek moyang kita. Terlebih, dalam era globalisasi yang menghadirkan pengaruh yang sangat kuat pada semua dimensi kehidupan, termasuk tata ruang, sehingga mewajibkan kita untuk memiliki landasan yang kuat dalam mengelola ruang sebagai tempat hidup dan berkembang. Disinilah nilai-nilai lokal dalam mengelola tata ruang sangat diperlukan untuk memperkuat jati diri dan kedirian bangsa Indonesia. Salah satu desa Bali Aga yang mampu menjaga tradisi dan nilai-nilai lokal tata ruang masyarakat Indonesia adalah masyarakat Desa Adat Panglipuran. Masyarakat Panglipuran telah menggunakan konsep tata ruang yang sangat sejalan dengan nilai-nilai dan pola tata ruang yang rasional dan sesuai dengan peruntukannya.

Kata Kunci : pengelolaan tata ruang, kearifan lokal, adat panglipuran

Pendahuluan

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya (Budihardjo & Sujarto, 1999). Ruang memiliki nilai yang sangat vital bagi kehidupan dan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di dunia. Tanpa adanya ruang yang memadai, dapat dipastikan manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Selain sebagai tempat hidup, ruang juga diyakini akan menjadi tempat manusia ketika mati. Oleh karena itu, masyarakat tradisional meyakini ruang juga mengandung nilai religius magis, sehingga juga harus dijaga dan dilestarikan untuk memelihara keseimbangan antara manusia dengan ekosistem lainnya.

Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karenanya dalam proses penataan ruang, tidak terbatas pada proses perencanaan saja. Tetapi, meliputi aspek pemanfaatan yang merupakan wujud operasional rencana tata ruang serta proses pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Tujuan tata ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sehingga kehidupan yang harmonis, lestari dan asri dapat diperoleh oleh manusia (Thohir, 1991).

Pada kenyataannya konsep tata ruang sebagaimana yang ingin diterjadikan oleh semua masyarakat tidak sejalan dengan harapan. Penggunaan lahan untuk kegiatan industri, pemukiman, penyelenggaraan pendidikan, supermarket, tempat hiburan, hotel dan restoran, perkantoran serta berbagai pembangunan lainnya tidak

mengacu secara pasti pada perencanaan tata ruang yang ada. Di sisi lain pertumbuhan penduduk Indonesia yang sudah mencapai 236 juta jiwa (Sensus Pendudukan Tahun 2010) yang diiringi dengan meningkatnya jumlah kebutuhan menimbulkan permasalahan yang signifikan. Menurut Budihardjo & Sujarto, (1999) beberapa permasalahan yang terjadi adalah, populasi penduduk yang berlebihan disuatu wilayah, tidak memadainya ruang terbuka hijau, terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya pencemaran terhadap udara, air dan tanah, terjadinya ketimpangan pembangunan, kurangnya tanah resapan air, bajir, tanah longsor, pemukiman yang tidak teratur, dan permukaan ruang yang tanpa bentuk. Berbagai permasalahan keruangan yang ada di hampir semua wilayah Indonesia, terutama daerah perkotaan merupakan bukti nyata tidak adanya pengelolaan tata ruang yang teratur dan terencana secara matang.

Secara tradisional masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengenal adanya konsep tata ruang dalam melakukan pembangunan. Adanya ruang yang dikeramatkan, hutan yang dikeramatkan, lahan yang tidak boleh untuk mendirikan rumah, kawasan pemukiman yang berkelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, kawasan untuk pemujaan, merupakan bentuk tata ruang tradisional yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk menjaga keseimbangan alam dan daya dukung lingkungan masyarakat tradisional biasanya melakukan penanaman pohon bambu di sisi sungai, mengkramatkan pohon yang besar, mengkramatkan beberapa areal hutan, dan mewajibkan menanam pohon pada waktu melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, oleh masyarakat "modern" tata ruang yang telah dibangun oleh nenek moyang ini dianggap sebagai sebuah konsep yang "kosong, tidak berdasar" dan "tanpa makna", karena tidak mampu dijelaskan

secara rasional dan ilmiah. Akibatnya, penggunaan ruang dilakukan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan kapasitas ruang dan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menyebabkan tata ruang menjadi rusak dan tanpa bentuk yang pasti.

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa Bali Mula yang masih memelihara tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Tata ruang masyarakat Desa Adat Penglipuran merupakan simbol sakralisasi adat dan tradisi yang telah bertahan ratusan mungkin ribuan tahun, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjaga harmonisasi lingkungan (Lasmawan, 2012). Untuk menjaga keasrian lingkungan masyarakat Penglipuran, mengembangkan hutan kramat yang didasarkan pada konsep *tri hita karana* (tiga penyebab kebahagiaan). Masyarakat Desa Adat Penglipuran juga telah menggunakan konsep *ulu-teben* (atas-bawah) dalam membangun pemukiman atau yang disebut oposisi biner oleh Levis Strauss (Levis Strauss, 1967), di mana atas sebagai lambang kesucian/utama dan bawah sebagai lambang unsur-unsur yang kotor/nista. Berdasarkan konsep ini tempat suci dibangun di utara atau didekat gunung, kemudian di bawahnya dibangun pemukiman dan paling selatan adalah wilayah kuburan serta tempat pertanian.

Demikian juga dalam membangun pekarangan rumah, mereka menggunakan konsep *tri mandala* (tiga ruang), yaitu *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*. Pembangunan rumah juga didasarkan pada konsep yang kuat, yaitu *asta kosala kosali* yang menentukan struktur bangunan dengan fungsinya masing-masing. Pekarangan rumah harus dikelilingi oleh tembok (pagar) dan setiap tembok antar tentangga ada jalan untuk menyeberangnya. Pagar dan gapura rumah juga dibangun dari tanah liat dan harus beratapkan bambu (Dwijendra, 2009). Jika kondisi ini dikaji dari dinamika

zaman saat ini, tampak konsep tata ruang yang dibangun masyarakat Desa Adat Penglipuran terlihat “nyeleneh” bahkan dapat dibilang “aneh”. Akan tetapi, jika kita analisis lebih dalam tata ruang yang dikembangkan oleh Masyarakat Desa Adat Penglipuran memiliki nilai-nilai kearifan tradisional yang kuat dan menunjukkan jati diri serta kedirian Bangsa Indonesia.

Berdasarkan kajian empiris dan analisis konseptual di atas, maka ada beberapa pertanyaan pokok yang layak dikedepankan, yaitu: apakah yang dijadikan dasar filosofi tata ruang pada masyarakat Desa Adat Penglipuran?, bagaimana tata ruang pada masyarakat Desa Adat Penglipuran?, dan bagaimana pelestarian dan pemberdayaan lingkungan pada masyarakat Desa Adat Penglipuran?.

Metodelogi

Penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu memperoleh data dan bahan-bahan bacaan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan tata ruang, dasar filosofi pengelolaan tata ruang pada masyarakat Desa Adat Penglipuran, pola tata ruang pada masyarakat Desa Adat Penglipuran, dan pelestarian serta pemberdayaan lingkungan pada masyarakat Desa Adat Penglipuran. Data mengenai filosofi tata ruang dan pola tata ruang dan pelestarian dan pemberdayaan lingkungan pada masyarakat Desa Adat Penglipuran kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk naratif.

Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai dasar filosofi pengelolaan tata ruang pada masyarakat Desa Adat Penglipuran, pola tata ruang pada masyarakat Desa Adat Penglipuran, dan pelestarian serta pemberdayaan lingkungan pada masyarakat Desa Adat Penglipuran.

Pembahasan Dasar Filosofi Pengelolaan Tata Ruang Pada Masyarakat Adat Panglipuran

Desa Adat Panglipuran merupakan salah satu Desa Bali Mula atau Bali Aga yang ada di Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Secara geografis Desa Adat Panglipuran berada di daerah dataran, berjarak kurang lebih tiga kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Bangli. Kedekatan dengan ibu kota kabupaten tidak membuat Desa Adat Panglipuran kehilangan jati diri dan nilai-nilai tradisionalnya. Bahkan sebaliknya, masyarakat Desa Adat Panglipuran dengan teguh mempertahankan tradisi dan nilai-nilai sosial religius yang diwariskan oleh nenek moyangnya sejak berabad-abad lamanya (Lasmawan, 2012). Demikian juga dengan konsep tata ruang yang dijadikan pedoman dalam membangun wilayah desa tetap dipegang teguh oleh masyarakat Desa Adat Panglipuran.

Manusia mempunyai kewajiban untuk mengharmoniskan alam semesta dengan segala isinya, yakni *bhuana agung* (makrokosmos) yaitu lingkungan buatan/bangunan dengan *bhuana alit* (mikrokosmos) yaitu manusia yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut (Subandi, 1990). Untuk menyelaraskan antara alam semesta dengan manusia, maka setiap lingkungan kehidupan dibuat senilai dengan alam dengan unsur-unsur yang utuh, yakni *tri hita karana*. *Tri hita karana* merupakan tiga unsur penyebab kabaikan, yaitu *atma* (roh/jiwa), *prana* (tenaga), dan *angga* (jasad/fisik) (Dwijendra, 2008). Konsep *tri hita karana* dipakai dalam pola ruang dan pola perumahan tradisional menjadi; (1) *parahyangan/pura kahyangan* tiga sebagai unsur jiwa, (2) *pawongan/warga* sebagai unsur tenaga, dan (3) *palemahan/tanah* sebagai unsur jasad (Kaler, 1983). Pada alam semesta jiwa adalah Tuhan Yang Maha Esa, tenaga adalah berbagai tenaga alam, dan jasad adalah bumi dengan segala

unsurnya. Pada desa adat jiwa adalah pura desa (parahiangan), tenaga adalah warga (pawongan), dan jasad adalah wilayah desa adat (palemahan). Jadi *Tri hita karana* adalah suatu pedoman hidup yang didasarkan kepada keharmonisan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesamanya, serta manusia dan lingkungannya agar tercapai kehidupan sejahtera lahir dan batin (*brahmawidya@gmail.com*. diakses Senin, 5 Januari 2015). Hubungan manusia dengan Tuhan, atau hubungan vertikal dilaksanakan dengan keyakinan untuk melaksanakan berbagai upacara *Dewa yadnya*. Upacara *dewa yadnya* adalah upacara pemujaan dan persembahan sebagai wujud bakti kehadapan Hyang Widhi dan segala manifestasi-Nya, yang diwujudkan dalam bermacam-macam bentuk *upakara*. Upacara ini bertujuan untuk pengucapan terima kasih kepada Hyang Widhi atas kasih, rahmat dan karunia-Nya sehingga kehidupan dapat berjalan damai. Upacara *dewa yadnya* umumnya dilaksanakan di *sanggah-sanggah*, *pamerajan*, *pura*, *kayangan* dan tempat suci lainnya yang setingkat dengan itu. Upacara *dewa yadnya* ada yang dilakukan setiap hari dan ada juga yang dilakukan secara periodik atau berkala. (<http://www.hindubatam.com/upacara/dewa-yadnya/tata-upacara.html> diakses pada hari Selasa, 6 Januari 2015).

Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya dilaksanakan berdasarkan konsep *suka-duka*. *Suka-duka* mengandung makna kebersamaan didalam memikul masalah dan menikmati rejeki yang dilimpahkan. Suka dan duka ini daplikasikan dengan melaksanakan *metetulang* (gotong royong) saat tetangga atau anggota masyarakat lainnya yang melangsungkan upacara *Dewa yadnya*, upacara perkawinan, upacara tiga bulanan, upacara potong gigi, upacara *ngaben* dan kegiatan lainnya (*suka*). Saling mengunjungi (mejenukan) dan memberi

motivasi bila ada anggota masyarakat lainnya yang mengalami kematian atau ada anggota masyarakat yang sedang sakit (*duka*) (Suyatna, 1982).

Sedangkan hubungan antara manusia dengan alam diaplikasikan lewat pemeliharaan alam dengan cara menanam pepohonan di daerah sekitar jurang. Selain itu juga, masyarakat mengkramatkan hutan bambu yang ada di hulu desa untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Sedangkan untuk menjaga keharmonisan alam dengan manusia juga dilakukan prosesi upacara *tumpek pengatag* (upacara enam bulanan bagi tumbuh-tumbuhan) yang bertujuan untuk menghormati semua tumbuh-tumbuhan yang telah memberikan penghidupan. Demikian juga dengan binatang dilakukan upacara *tumpek kandang* (upacara enam bulanan untuk semua jenis peliharaan) yang bertujuan untuk memohon keselamatan akan binatang yang mereka pelihara. Yang lebih utama dari itu, adalah bagaimana manusia mengungkapkan rasa syukur dihadapan TYME atas segala limpahan karunia yang telah diberikan.

Dasar filosofi *tri hita karena* ini dalam bagian hubungan manusia dengan alam semesta, diterjemahkan dalam konsep tata ruang yang lebih sempit kedalam konsep *tri angga* (Dwijendra, 2008). *Tri angga* merupakan tiga badan yang menekankan nilai fisik, yaitu *utama angga* (kepala), *madya angga* (badan), dan *nista angga* (kaki) dalam mikrokosmos. Dalam makrokosmos konsep *tri angga* ini menjadi *tri Mandala* yang berarti tiga wilayah. Berdasarkan konsep *tri mandala* ini, ruang atau wilayah dalam Desa Adat Penglipuran dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*. Bagian *utama mandalam* merupakan bagian yang paling suci dari wilayah desa, sedangkan *madya mandala* merupakan areal yang mengandung nilai sedang dan *nista mandala* merupakan areal

yang mengandung nilai yang paling rendah (Dwijendra, 2008).

Berdasarkan pembagian tata ruang ini akan dengan mudah dipetakan di mana membangun pura sebagai tempat suci, di mana membangun pemukiman, sekolah, lapangan olah raga, kuburan, jalan dan fasilitas lainnya. Konsep *tri mandala* ini juga menjadi pedoman dalam membangun pekarangan rumah pada masing-masing keluarga, dimana pada setiap pekarangan dibagi menjadi tiga yaitu *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*. Pembagian *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala* berdasarkan pada konsep *hulu-teben* (atas bawah) atau oposisi biner, dimana sebenarnya masing-masing wilayah mempunyai fungsi sesuai dengan sifat dan ruangnya masing-masing. *Hulu* artinya arah yang utama, sedangkan *teben* artinya hilir atau arah berlawanan dengan hulu. Ada dua patokan yang digunakan untuk menentukan arah *hulu*, yaitu (1) arah timur, dan (2) arah *kaja* (utara). Mengenai arah Timur bisa diketahui dengan tepat dengan menggunakan kompas, sedangkan arah *kaja* adalah letak gunung atau bukit. Berdasarkan konsep *hulu-teben*, maka *utama mandala* adalah paling utara dalam wilayah desa, paling timur dalam pekarangan, sedangkan *madya mandala* berada ditengah-tengah, dan *nista mandala* ada dibagian selatan pada wilayah desa dan paling barat pada pekarangan rumah. Konsep *tri mandala* berdasarkan pada tubuh manusia yang terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala, badan dan kaki, yang mempunyai fungsi masing-masing dan saling tergantung satu sama lain (Kaler, 1983). Secara prinsip masing-masing ruang sangat penting dalam tata ruang akan tetapi difungsikan sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk bangunan pekarangan rumah, rumah, tembok dan gapuranya, masyarakat Desa Adat Penglipuran menggunakan konsep *asta kosala kosali*. *Asta kosala kosali* merupakan

sebuah tata cara, tata letak, dan tata bangunan untuk bangunan tempat tinggal serta bangunan tempat suci yang ada di Bali yang sesuai dengan landasan filosofis, etis, dan ritual dengan memperhatikan konsepsi perwujudan, pemilihan lahan, hari baik (dewasa) membangun rumah, serta pelaksanaan *yadnya*. Penataan bangunan yang dimana di dasarkan oleh anatomi tubuh yang punya. Pengukurannya pun lebih menggunakan ukuran dari tubuh yang mempunyai rumah. Mereka tidak menggunakan meter tetapi menggunakan seperti ; (1) *musti* (ukuran atau dimensi untuk ukuran tangan mengepal dengan ibu jari yang menghadap ke atas), (2) *hasta* (ukuran sejengkal jarak tangan manusia dewasa dari pergelangan tengah tangan sampai ujung jari tengah yang terbuka), dan (3) *depa* (ukuran yang dipakai antara dua bentang tangan yang dilentangkan dari kiri kekanan) (*brahmawidya@gmail.com*. diakses Senin, 5 Januari 2015).

Pola Tata Ruang Pada Masyarakat Adat Penglipuran

Pola tata ruang pada masyarakat Desa Adat Penglipuran perpatokan pada konsep dasar, *Tri hita karana*, *tri mandala*, *asta kosala kosali*. Konsep *tri hita karana* dalam aspek palemahan diimplementasikan dalam usaha mewujudkan kerharmonisan hubungan manusia dengan alam semesta. Manusia akan mencapai kesejahteraan hidup apabila alam tempat hidup tumbuh dan berkembangnya manusia dipelihara dan dilestarikan dengan baik (Budiharjo & Sujarto, 1999). Untuk mewujudkan itu masyarakat Desa Adat Penglipuran menjadikan hutan bambu yang ada di sebelah utara desa sebagai hutan kramat, atau tidak diperbolehkan menebang untuk kepentingan pribadi. Hutan bambu hanya boleh ditebang apabila ada upacara adat yang memerlukan bambu dan mendapat persetujuan dari semua anggota *krama* desa melalui *paruman* desa (musyawarah) (Lasmawan, 2003). Demikian juga dengan

masyarakat Desa Adat Penglipuran diwajibkan untuk menanam pepohonan di daerah tepi jurang untuk menahan erosi dan pelindung desa dari ancaman dari luar. Di samping sebagai penahan erosi hutan disisi jurang juga dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang bernilai ekonomis, seperti membuat bingkau lampu lentera, dan membuat ayaman bambu lainnya.

Pola desa bangunan Adat Penglipuran adalah berjejer dari utara keselatan dengan wilayah-wilayah yang telah didasarkan pada konsep *hulu-teben* (Dwijendra, 2009). Wilayah paling utara digunakan untuk hutan bambu yang dikrmatkan dan disucikan oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran, dan sangat tabu untuk ditebang bila tidak ada kepentingan upacara adat. Di sebelah selatannya dibangun pura puseh dan pura balai agung sebagai tempat berstananya *dewa brahma* dan *dewa wisnu*. Wilayah ini dianggap sebagai tempat yang paling suci, atau *utama mandala*. Selain letaknya di utara dari perumahan penduduk, wilayah *utama mandala* ini juga lebih tinggi dari wilayah pemukiman dan tempat kegiatan lainnya, sehingga dapat terlihat dengan jelas bangunan pura dari daerah selatan.

Pada *madhya mandala* berjejer secara linier perumahan penduduk dengan posisi gapura menghadap kesisi jalan raya. Gapura rumah ada yang menghadap kebarat dan ada yang menghadap ketimur, sehingga jalur jalan mengelilingi Adat Penglipuran. Akan tetapi jalur jalan masuk dan keluar dari dari wilayah Adat Penglipuran hanya satu. Di tengah wilayah pemukiman terdapat balai banjar yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan umum. Selain sebagai tempat pertemuan, balai banjar ini juga berfungsi untuk kegiatan upacara *yadnya* lainnya. Disebelahnya terdapat lapangan terbuka yang digunakan untuk kegiatan olahraga, seperti bola voly dan sepak bola, namun ukurannya tidak sebesar

lapangan sepak bola pada umumnya. Dan disebelahnya berjejer warung-warung yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat Adat Penglipuran.

Pada wilayah *nista mandala* terdapat taman makam pahlawan Kabupaten Bangli. Salah satu pejuang kemerdekaan yang dimakamkan ditaman makam pahlawan ini adalah Kapten Mudita pejuang dari Puri Bangli. Di areal makam pahlawan ini dibangun balai besar yang berfungsi sebagai tempat untuk siarah atau melakukan kegiatan lainnya. Di depan taman makam pahlawan dibangun lapangan untuk kegiatan olahraga. Di sebelah barat taman makam pahlawan adalah wilayah kuburan masyarakat Adat Penglipuran. Di sebelah selatan merupakan wilayah pertanian Masyarakat Adat Penglipuran. Menurut Anindya (1991) kegiatan yang bersifat sakral dilakukan di daerah *utama mandala*, kegiatan yang bersifat keduniawian (sosial ekonomi dan perumahan) di *madya mandala*, dan kegiatan yang dipandang kotor dan mengandung limbah dilakukan di daerah *nista mandala*.

Tri mandala selain diaplikasikan dalam konsep tata ruang wilayah Adat Penglipuran secara umum, juga diaplikasikan dalam pembangunan pekarangan rumah masing-masing masyarakat. Pada wilayah *utama mandala* dibangun *sanggah* atau *merajan* (pura keluarga) tempat pemujaan Tuhan dan roh leluhur. Pada wilayah *madya mandala* dibangun dapur sebagai tempat untuk memasak dan balai *saka enam* untuk tempat upacara *manusa yadnya* (kematian, potong gigi, kawin). Sedangkan pada wilayah *nista mandala* dibangun balai *dauh* yang berfungsi untuk kamar tamu, kamar TV dan kamar tidur, serta dibangun tempat untuk sanitasi lingkungan (Dwijendra, 2009). *Tri mandala* juga dijadikan dasar dalam membangun pura, sehingga wilayah pura terdiri dari tiga

wilayah yaitu *utama mandala* yang terdiri dari bangunan pelinggih, *madya mandala* yang terdiri dari bangunan untuk *paruman*, *balai gong*, *balai banten*, *balai pegat*, dan tempat untuk persembahyangan, serta *nista mandala* yang digunakan untuk tempat *meebat* dan dapur untuk kegiatan upacara dipura tersebut.

Membangun rumah digunakan konsep asta kosala kosali, yaitu sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci yang secara oprasional dilandasi oleh konsep *desa-kala-patra* (tempat, waktu dan keadaan) (Meganada, 1990). Pengukurannya pun lebih menggunakan ukuran dari Tubuh yang mempunyai rumah, mereka tidak menggunakan ukuran meteran tetapi menggunakan seperti ; (1) *musti* (ukuran atau dimensi untuk ukuran tangan mengepal dengan ibu jari yang menghadap ke atas), (2) *hasta* (ukuran sejengkal jarak tangan manusia dewasa dari pergelangan tengah tangan sampai ujung jari tengah yang terbuka), dan (3) *depa* (ukuran yang dipakai antara dua bentang tangan yang dilentangkan dari kiri ke kanan). Ukuran pekarangan menggunakan *sikut satak* (sekitar sepuluh *depa* kali dua puluh *depa*), sehingga menjadi dua ratus *depa* atau sekitar 6,5 are. Untuk bangunan sanggah yaitu *pitung depa* tambah *duang hasta* kali *enam depa ken a hasta* atau sekitar sepuluh meter kali sebelas meter. Sedangkan untuk dapur *duang depa* kali *duang depa tengah* atau sekitar tiga meter kali empat meter. Sedangkan bale *saka enem* atau balai dangin adalah *duang depa* kali *telung depa* tambah *limang hasta* atau sekitar tiga meter kali lima meter. Sedangkan untuk balai *dauh* atau rumah TV, kamar tidur, dan kamar tamu, tidak ditentukan secara pasti. Dalam pekarangan terdapat *natah* (ruang terbuka) yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan.

Pelestarian dan Pemberdayaan Lingkungan Pada Masyarakat Adat Penglipuran

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 32 Tahun 2009). Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, terlebih masyarakat Adat Penglipuran yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan wisata budaya. Lingkungan alam dan sosial merupakan simpul-simpul yang memberikan esensi jiwa dan semangat hidup pada masyarakat Adat Peglipuran. Lingkungan alam merupakan segala sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan dengan proses eksplorasi maupun dengan memasarkan keindahannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat desa adat penglipuran yang membentuk kepribadian anggota masyarakat Adat Pengelipuran. Lingkungan sosial dan budaya yang dibuat masyarakat terdiri dari sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial, termasuk dalam kaitannya dengan pelestarian dan pemberdayaan lingkungan (Daldjoeni, 1983).

Pelestarian lingkungan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap seperti keadaan semula, tidak rusak, dan terlindungi dari kemusnahan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Adat Penglipuran dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan; (1) mengembangkan awig-awig (aturan hukum adat) yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam, (2) menjadikan desa adat sebagai lembaga tertinggi di tingkat

desa yang mengelola lingkungan desa secara umum, (3) membentuk pengurus adat yang khusus membidangi pengelolaan lingkungan, yang bertanggungjawab kepada bendesa adat dan masyarakat, (4) memberikan tanggungjawab kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan perumahan masing-masing dan *telajakan* (jalan dan saluran air di depan pekarangan), (5) menetapkan bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai tembok dan gapura pekarangan, (6) melakukan konservasi terhadap hutan kramat, dan (7) melakukan gotong royong setiap seminggu sekali secara bergilir dari masing-masing organisasi adat.

Upaya melestarikan arsitektur bangunan asli, Masyarakat Adat Penglipuran menetapkan beberapa aturan dalam pembuatan rumah dan gapura pekarangan rumah. Untuk dapur, diwajibkan terbuat dari bambu, baik untuk dinding, rangka bawah, rangka atas dan atapnya. Sedangkan untuk pondasinya terbuat dari tanah liat yang dikentalkan, sehingga menjadi kuat dan tahan lama. Menurut keyakinan masyarakat Adat Penglipuran, dapur sebagai tempat penyimpanan makanan rawan dari ilmu hitam yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sedangkan bambu memiliki fungsi untuk menangkal masuknya ilmu hitam, sehingga melindungi makanan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan dinding bambu arus pentilasi udara sangat lancar, sehingga tidak membuat pengap penghuninya atau ibu rumah tangga yang sedang masak menjadi pengap (Wijayanada, 2004).

Untuk tembok dan gapura pakar pekarangan rumah, diwajibkan menggunakan tanah liat yang telah dikentalkan. Mengenai motif dan bentuknya bisa disesuaikan dengan selera seni dari masing-masing masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini motif tembok pekarangan rumah dan gapura masih sarat dengan nilai-

nilai tradisional serta relatif sama antara gapura pekarangan yang satu dengan yang lainnya. Tinggi tembok pekarangan tidak boleh lebih dari leher pemiliknya, sehingga memudahkan untuk melihat keluar atau kepekarangan rumah tetangga. Hal ini bertujuan untuk mengontrol perilaku sosial anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Adat Penglipuran. Tembok pekarangan juga harus memuat jalan tembus dengan tetangga yang ada di samping-samping rumah. Sehingga memudahkan untuk melakukan hubungan sosial dengan tetangga dan memudahkan komunikasi jika terjadi keadaan yang membahayakan (Lasmawan, 2012). Atap gapura pekarangan harus terbuat dari bambu atau yang disebut dengan *gentang tiing*. Tujuannya adalah untuk menetralkan niat jahat dan ilmu hitam yang hendak masuk dalam pekarangan rumah.

Menjaga keasrian lingkungan pekarangan dan jalan yang ada di depannya (telajakan) termasuk saluran air, merupakan tanggungjawab dari masing-masing pemilik rumah. Sedangkan untuk tempat-tempat umum seperti pura, lapangan olah raga, balai banjar, menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat Adat Penglipuran. Untuk menjaga keasrian tempat umum, masing-masing organisasi mendapatkan giliran untuk melakukan pembersihan. Adapun organisasi desa adat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong adalah organisasi *truna-truni* (pemuda-pemudi), organisasi *pecalang adat* (aparatur keamanan tradisional desa adat), *desa tuh* (organisasi perempuan), *sekaa gong dan sekaa baris* (organisasi seni desa adat), dan *banjar adat* (anggota banjar adat). Giliran untuk kegiatan gotong royong diatur dan ditentukan oleh *bendesa adat* yang menjadi kepala dari organisasi *desa adat*. Kesadaran akan penataan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan individu, organisasi dan masyarakat, membuat masyarakat secara

alamiah memikul tanggung jawab terhadap kelestarian dan penataan lingkungannya (Daldjoeni, 1996)

Sedangkan untuk bangunan lain, seperti balai dauh (kamar TV, kamar tamu, tempat tidur) diberikan kebebasan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian juga dengan pembangunan balai dangin atau balai saka enam dan sanitasi diberikan keleluasaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Akan tetapi, secara umum bangunan Masyarakat Adat Penglipuran masih menunjukkan arsitektur Bali kuno, dengan berbagai vareasinya. Kondisi ini menyebabkan tata ruang wilayah dan bangunan pekarangan Masyarakat Penglipuran masih sangat sarat dengan nilai-nilai lokal. Keunikannya inilah yang menyebabkan banyak wisatawan baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke wilayah Adat Penglipuran (Lasmawan, 2012). Kedatangan wisatawan ini menjadikan Masyarakat Adat Penglipuran semakin kuat dengan nilai-nilai lokal tata ruang yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bahkan masyarakat semakin menyadari aspek penting tata ruang lokal yang bernilai arsitektur tinggi, dan jarang dimiliki oleh negara-negara industri yang sudah berkembang dan maju, sehingga mereka kagum akan keunikan tata ruang Masyarakat Adat Penglipuran. Di sisi lain, "cipratan dolar" yang dihasilkan dari tata ruang lokal yang mereka pertahankan dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada *masyarakat Adat Penglipuran*.

Penutup

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa poin pemikiran aplikatif yang nantinya dapat direkomendasikan sebagai simpulan dari karya ilmiah ini, yaitu:

1. Masyarakat Adat Penglipuran telah memiliki landasan konseptual dalam melakukan pengelolaan terhadap tata

ruang yang bersumber pada dasar filosofi hidup *tri hita karana*. Dalam pengelolaan ruang wilayah desa masyarakat Adat Peglipuran menggunakan konsep *tri angga* yang dalam makrokosmos diaplikasikan menjadi *tri mandala*, yaitu pembagian ruang berdasarkan letak dan kegunaannya. Konsep *tri mandala* juga digunakan dalam melakukan tata ruang di wilayah pekarangan masing-masing masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan rumah dan bangunan suci di dalam pekarangan dan pagar pekarangan serta gapura menggunakan *asta kosala kosali*.

2. Implementasi konsep *tri mandala* dalam pembangunan tata ruang wilayah Adat Peglipuran berdasarkan pada konsep *ulu-teben* (oposisi biner). Urutan paling utara adalah wilayah *utama mandala* yang diperuntukkan untuk bangunan suci dan hutan bambu yang dikramatkan (untuk kegiatan suci). Kawasan *madya mandala*, merupakan kawasan pemukiman penduduk, lapangan olah raga, balai banjar, sekolah, dan bangunan yang digunakan untuk aktivitas lainnya (kegiatan keduniawian). Sedangkan kawasan *nista mandala*, atau yang paling selatan merupakan areal kuburan dan lahan pertanian masyarakat Adat Peglipuran (kegiatan yang dianggap kotor dan mengandung limbah).

3. Untuk tetap menjaga kondisi lingkungan dan tata ruang, Masyarakat Adat Peglipuran melakukan pelestarian lewat, (1) pembuatan hukum adat, (2) meletakkan pengelolaan tata ruang pada lembaga adat, (3) memberikan tanggungjawab kepada semua anggota masyarakat dalam melestarikan lingkungan, (4) menetapkan hutan lindung, (5) menetapkan wilayah pekarangan dan arsitektur bangunan yang menunjukkan nilai-nilai lokal, dan (6) menetapkan sanksi pada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum ada yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Budiharjo & Sujarto. (1999). *Kota Bekelanjutan*. Bandung: Alumni
- Daljoni. (1998). *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni
- Daljoni. (1983). *Manusia Penghuni Bumi (Bunga Rampai Geografi Sosial)*. Bandung: Alumni.
- Dwijendra, Acwin. (2008). *Arsitektur Rumah Tradisional Bali berdasarkan Asta Kosala Kosali*. Denpasar: Udayana University Press
- Dwijendra, Acwin. (2009). *Arsitektur dan Kebudayaan Bali Kuno (Berdasarkan Kajian Desa-Desa Tradisional di Bali)*. Denpasar: Udayana University Press
- Kaler. I.G.K. (1983) *Butir-butir Tercecera tentang Adat Bali*. Denpasar Bali Agung.
- Lasmawan, Wy. (2012). *Saih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali. (Laporan Penelitian)*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Levi, Strauss. (1967). *Structural Anthropology*. New york: A Doubleday Anchor Book
- Suyatna I Gede, (1982). *Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan (disertasi)*. Bogor : Fak. Pertanian IPB
- Thoir. A. (1991). *Butir-Butir Tata Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wijayanada, Jaya. (2004). *Tata Letak Tanah dan Bangunan serta Pengaruhnya Terhadap Penghuninya*. Denpasar: Paramita Surabaya
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

(<http://www.brahmawidya@gmail.com>.
diakses Senin, 5 Januari 2015).

([http://www.hindubatam.com/upacara/
dewa-yadnya/tata-upacara.html](http://www.hindubatam.com/upacara/dewa-yadnya/tata-upacara.html) diakses
pada hari Selasa , 6 Januari 2015).